



Perlindungan Hukum Korban Binary Option (Studi Kasus Indra Kenz)

Boby Agusty¹, Rahtami Susanti²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: bobyagusty67@gmail.com

Abstract

Binary options are financial products in which the parties involved are placed on one of several options within a certain period of time. the legality of binary options as one of the futures trading commodities is still debated. there are two possibilities available, namely between portfolio assets will go up or down. this application can be called online gambling because the investor will profit when his guess is correct but suffer losses and his deposit is lost when he loses. This research aims to find out how legal protection can be given to victims of Binary Option Affiliators and the method through the approach that will be used in this research is a normative juridical approach, on February 3, 8 Binomo victims sued an indra kenz to the police. These victims admitted that they currently suffered a loss of Rp. 2.4 billion. The victim's lawyer reported several articles, namely article 27 paragraph 2 regarding online gambling, article 28 paragraph 1 related to false news that harms consumers with electronic transactions and article 378 related to fraud and article 3, article 5, article 10 of the Crime of Money Laundering.

Keywords: legal protection, Binomo, Indra Kenz

Abstrak

Binary Option yaitu produk finansial di mana para pihak yang terlibat ditempatkan pada satu dari beberapa pilihan dalam jangka waktu tertentu. legalitas Binary Option yang sebagai salah satu komoditi perdagangan berjangka masih diperdebatkan. ada dua kemungkinan tersedia, yaitu antara aset portofolio bakal naik atau malah turun. aplikasi ini bisa disebut sebagai judi online di karenakan pihak investor yang akan untung ketika tebakannya benar namun mengalami kerugian serta depositnya hangus saat mengalami kekalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum yang bisa diberikan untuk korban *Affiliator Binary Option* dan Metode melalui pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Pada Tanggal 3 Februari 8 orang korban Binomo menuntut seorang indra kenz ke pihak polisi. Para korban ini mengakui saat ini mengalami kerugian sejumlah Rp. 2,4 Milyar. Pengacara Korban Melaporkan dengan beberapa pasal yaitu pasal 27 ayat 2 tentang terkait perjudian online, pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong yang merugikan konsumen dengan transaksi elektronik dan pasal 378 berkaitan penipuan serta pasal 3, pasal 5, pasal 10 Tindak Pidana Pencucian uang.

Kata Kunci: perlindungan hukum, Binomo, Indra Kenz

I. Pendahuluan

Kronologi Kasus Indra Kenz Bermula pada tanggal 3 Februari 8 orang korban Binomo melaporkan Indra Kenz ke polisi. Mereka mengaku merugi sejumlah Rp. 2,4 Milyar. Pengacara korban melaporkan dengan beberapa pasal yaitu pasal 27 ayat 2 tentang terkait perjudian online, pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong yang merugikan konsumen dengan transaksi elektronik dan pasal 378 berkaitan penipuan serta pasal 3, pasal 5, pasal 10 tindak pidana pencucian uang. Segala bentuk kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam undang-undang sangat tidak dibenarkan. Kejahatan langsung maupun tidak langsung sangat beragam, salah satu contohnya kejahatan di media social ataupun internet. Salah satu yang cukup familiar di masyarakat adalah tindak kejahatan *cybercrime* yang sudah beberapa tahun

kebelakang marak di Negara Indonesia.¹ Salah satu contoh *cybercrime* tersebut adalah tindak kejahatan pencucian uang. Pencucian uang (*money laundering*) adalah upaya untuk menyembunyikan asal usul dana yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan) melalui berbagai transaksi, biasanya melalui perbankan.² Dengan tujuan agar aparat penegak hukum sulit menelusuri harta tersebut, sehingga terkesan dana tersebut merupakan dana yang “legal”.³ Sudah banyak terjadi jenis kejahatan *cybercrime* dalam kasus pencucian uang yang harus menjadi perhatian, salah satunya yang akan dikaji peneliti yaitu mengenai binary options. Beberapa kalangan pemuda pada umumnya belum mengetahui definisi dan asal usul dari binary options, khususnya mahasiswa. Binary Option adalah produk bidang finansial yang mana para pihaknya terlibat pada satu dari dua pilihan untuk kurun waktu tertentu. Secara yuridis, legalitas binary option sebagai salah satu komoditi perdagangan berjangka masih diperdebatkan.⁴ Binomo merupakan sebuah aplikasi untuk binary option trading (perdagangan opsi biner). Yang dimaksud dengan opsi adalah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki aset portofolio sesungguhnya, yaitu dengan menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio.⁵

Penyedia layanan, regulator, pengawas, dan penegak hukum harus beradaptasi dan merespons dengan tepat tantangan yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi keuangan. Pasalnya, para pelaku kejahatan semakin canggih untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh inovasi untuk mencari keuntungan dengan memanipulasi pasar keuangan.⁶ Ada dua pihak didalam transaksi suatu perdagangan, yaitu penjual dan pembeli.⁷ Sama halnya di dalam binary option, namun terdapat perbedaan yaitu pembeli dan penjual tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah melakukan transaksi secara fisik. Semua kegiatan jual beli dalam trading binary option dilakukan dalam bentuk perjanjian dan diperantarai oleh lembaga arbitrase atau yang dikenal dengan sebutan broker. Binary option illegal dapat diakses kapan saja dan bahkan perdagangan ini hampir buka selama 24 jam disetiap hari. Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi siapapun yang mengakses situs binary option untuk melakukan transaksi jual beli dengan waktu fleksible tanpa terganggu oleh jam-jam kerja bagi yang masih terikat dengan jam kerja perusahaan. Bahkan hal ini juga sangat menguntungkan bagi kalangan mahasiswa untuk diakses disela waktu senggang selama kuliah. Hal ini tentunya tidak lepas dari faktor negatif, dengan waktu akses tanpa batas menjadikan banyak oknum memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan secara tidak langsung. Tawaran dari situs binary option menjanjikan seseorang yang bergabung menjadi kaya raya hanya dengan teknik trading sangat dimanfaatkan manusia untuk melakukan suatu tindak pidana pencucian uang.⁸

Masih banyak pro dan kontra mengenai tindak kejahatan ini. Terlebih bagi masyarakat awam yang menginginkan kekayaan tanpa adanya usaha. Tindakan dalam hal ini juga dapat merugikan banyak pihak.⁹ Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor penulis untuk meneliti

¹ Aziz Syamsuddin, 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 3

² Iskandar Wibawa, 2018, *Cyber Money Laundering*. Yudisia, Vol. 8, No. 2, Hlm. 241-242

³ *Ibid*, hlm 243.

⁴ Puspitasari, D., & Rachim, F. R. A., 2021, Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 2 No.8, Hlm. 627-648.

⁵ Erizka Permatasari, "Apakah Binomo Legal di Indonesia?" (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-1t5bee760dea39e/>), diakses 15 April 2022, pukul 20.00 WIB

⁶ Louis de Koker and Doron Goldbarsht, 2022, "Financial Technologies and Financial Crime: Key Developments and Areas for Future Research," *Jurnal in Financial Technology and the Law : Combating Financial Crime*, Hlm.1-5

⁷ Amin Widjaja Tunggal, 2014. *Pencegahan Pencucian Uang*. Jakarta: Harvarindo. Hlm. 56

⁸ Yudi Kristiani. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media. Hlm.25.

⁹ Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana, Hlm. 34

binary option dari segi korban tindak kejahatan pencucian uang dengan judul skripsi "PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN BINARY OPTION (STUDI KASUS INDRA KENZ)".

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban *affiliator binary option* dalam kasus dengan terdakwa Indra Kenz?

III. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada menganalisis norma yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif.¹⁰ Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dokumen bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mendukung argumentasi tentang Afiliate Binary Option. Oleh karena itu, landasan penelitian ini adalah analisis standar hukum, yang juga melibatkan penelitian tentang dasar-dasar Perlindungan Hukum.¹¹ Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis berdasarkan norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Dengan analisis data tersebut diharapkan pada akhir penelitian dapat dicapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan dapat diambil suatu kesimpulan.¹²

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi korban *Affiliator Binary Option* Dalam Kasus Dengan Terdakwa Indra Kenz

Trading juga bisa disebut dengan *affiliator*, yaitu sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Seorang *affiliator* juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi orang lain agar menggunakan produk yang dipromosikannya. Dalam hal ini *affiliator binary option* dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi marketing karena mempromosikan pada masyarakat luas. Umumnya seorang *affiliator* melakukan promosi dengan cara mempertontonkan keuntungan dari hasil trading untuk menarik target konsumennya. Dengan begitu, *affiliator* mampu menarik minat dari masyarakat untuk memainkan trading binary option tersebut. Adanya *affiliator* ini, banyak orang yang ingin mengikuti jejak *affiliator* dengan cara bermain trading binary option tanpa dipelajari dahulu sebelumnya. Masyarakat saat ini tergiur dengan promosi yang dilakukan oleh *affiliator*, sehingga banyak orang awam yang belum mengerti dan mengetahui tentang trading binary option mengikuti trading tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan, namun, pada kenyataannya mereka tidak diedukasi dengan baik oleh *affiliator* bagaimana cara bermain trading binary option ini sehingga banyak dari mereka yang menjadi korban penipuan dari trading tersebut. Masyarakat belum memahami resiko apa saja yang akan didapat dari trading binary option ini, oleh karena itu perlu adanya hukum untuk mengatur masalah tersebut.¹³ menurut R. Sugandhi

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm.295.

¹¹ H. Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹² *Ibid*, Hlm 99-100.

¹³ Fikri Fathurrachman, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2 Hlm. 1011-1017

tindakan seseorang dengan Cara tipu muslihat merupakan rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu untuk menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak¹⁴. Di Negara Republik Inonesia ini Binary Option Trading mulai ada tahun 2018 melalui pemasaran media massa digital. Namun memang kendati demikian, perjalanan Binary Option Trading tidaklah mulus. Dengan skema Binary Option yang sangat spekulatif di antara pilihan harganya naik atau turun, maka dapat dikatakan bahwa Binary Option memiliki risiko yang sangat tinggi.¹⁵

Platform perdagangan yang ditawarkan terbuka untuk perdagangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perdagangan berjangka komoditas. Sehingga investor yang menggunakan platform perdagangan Binomo sebagai investasi tidak dapat memperoleh perlindungan hukum, baik secara implisit maupun eksplisit, sesuai UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Investor dapat menggunakan hukum umum yang berlaku di Indonesia untuk mendapatkan kembali haknya, tentunya dengan segala akibat hukum dalam pelaksanaannya.¹⁶ Lokasi perusahaan Binomo berasal dari ST Vincent and the Grenadines yang berada di Karibia. Binomo meyakinkan mengenai platform dengan cara menuliskan telah bersertifikat CROFR, akan tetapi mengutip Investing.com, CROFR itu sendiri merupakan pusat regulasi pasar keuangan Rusia dan serta tidak bisa dilacak mengenai kebenaran klaim itu sendiri. Binary option merupakan bagian dari instrument trading online, yang di mana para pengguna atau yang biasa disebut dengan trader memprediksi mengenai harga aset.¹⁷ Yang bisa disimpulkan bahwa aplikasi Binomo bukan aplikasi yang melakukan transaksi jual beli, yang disebabkan oleh prakteknya. Dimana para pengguna yang hanya dihadapkan dengan adanya sistem yang berjalan secara otomatis¹⁸

Transaksi binary option ini hanya menebak suatu aset akan mengalami kenaikan atau penurunan. Jika menang, trader tersebut berhasil maka dapat meraih keuntungan berkisar hingga 90 persen. Sedangkan, saat kalah maka modal trader tersebut akan hilang 100 persen dan mengalami kerugian. Sampai Sekarang belum ada payung hukum yang mengatur binary option. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai pengawas industri jasa keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) sebagai pengawas perdagangan komoditas tidak mengakui binary option. Transaksi binary itu hanya menebak suatu aset akan mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Jika menang, trader tersebut berhasil maka dapat meraih keuntungan berkisar hingga 90 persen.¹⁹ Dalam platform binary option telah disepakati bahwa jika investor telah memprediksi dengan tepat pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu, maka ia berhak atas uang yang telah dijanjikan oleh platform tersebut dalam jumlah tertentu. Profit yang diberikan berdasarkan persentase % dari nilai modal yang dipertaruhkan oleh investor, yang telah dijanjikan oleh platform awal preposisi. Misalnya, jika seorang investor bertaruh Rp. 100.000,-, maka platform menjanjikan keuntungan 80%, jika prediksi investor benar, maka ia berhak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,-.²⁰

¹⁴ Hana Faridah, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 8, No.1, Hlm.167

¹⁵ Yopie Diondy Kurniawan, 2022, Sosialisasi Bahaya Trading Illegal Binary Option Pada Warga Rt 36 Perumahan Dumai Indah, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1, No.1, Hlm. 16

¹⁶ Theresia Anita Christiani, 2022, Binomo Case In Customer Legal Protection Perspective, *Journal of Positive School Psychology*, Vol. 6 No. 6, Hlm.8863

¹⁷ Nadila Sandra Firga Romadhona, 2022, Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal Pada Aplikasi Binomo, *Jurnal Indonesia Law Reform*, Vol 2, No. 2, Hlm. 241

¹⁸ Hilda Hilmiah Dimiyati, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No. 2, Hlm 33-43

¹⁹ Khalid Dhiya UL Haqq, 2022, Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option, *Jurnal Pro Hukum*: Vol . 11, No. 2 , Hlm. 369-367

²⁰ Maya Panorama, 2022, Maysir Element Analysis In Binary Option Platform Case Study Of Iq Option Application, *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, Vol 1 No 10, Hlm.1290

No.	Nama	Nilai / Konten
1	Forex Ilegal	1.167
2	Pialang berjangka ilegal	961
3	Investasi ilegal	843
4	Binary Option	209

Sumber Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Semua agenda dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan tentang kegiatan Bursa Berjangka dilakukan di lokasi dan melaporkan kepada BAPPEBTI. BAPPEBTI sebagai institusi yang memberi perlindungan kepada investor dalam Binomo trading agar tidak terjadi kerugian, antara lain membujuk dengan menjanjikan keuntungan, tidak menyalurkan amanat nasabah sesuai dengan perintah, melaksanakan transaksi tanpa sepengetahuan atau tanpa perintah nasabah, tidak menjelaskan resiko yang dihadapi calon nasabah, dan tidak menempatkan dana nasabah pada rekening yang terpisah.²¹ Perlindungan yang diberikan BAPPEBTI, nasabah yang mengalami kerugian juga mendapatkan perlindungan secara khusus yang diatur dalam BAB VI Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai dana kompensasi.²² Sejak tahun 2019, praktik opsi biner telah diberikan tindakan tegas berupa pemblokiran oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan.²³

No	Tahun	Jumlah Putusan
1	2018	200
2	2019	239
3	2020	313
4	2021	333
5	2022	71

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perlindungan hukum adalah perlindungan dari negara yang diberikan pada masyarakat selaku subjek hukum. Adapun jenis daripada perlindungan hukum berdasarkan pendapat Hadjon yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif merupakan jenis perlindungan yang mana tujuannya ialah untuk pencegahan akan terjadinya sengketa.²⁴ Sedangkan, perlindungan represif dilaksanakan ketika sengketa sudah terjadi dan tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Dalam ranah perdata, perlindungan bagi korban ataupun pihak yang mengalami kerugian diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun Pasal 1365 KUHPerdata tercantum sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Menurut pendapat Rutten, orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum apabila terdapat kesalahan didalamnya. Unsur terakhir dalam

²¹ Halim, Pathorang. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*. Yogyakarta : Total Media. Hlm.120

²² I Made Aswin Ksamawantara, 2021, Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Broker Forex Ilegal, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 2, Hlm. 283

²³ Muhammad Ardiansyah, 2022, Legal Analysis Of Binary Options Through Online-Based Platforms, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6, No.4, Hlm. 2

²⁴ Rahardjo, Satjipto. Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik. Cetakan ke-1. Jakarta, 2011. Hlm. 67.

Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan kausal antara pelaku dan korban akan kerugian yang dialami. Pasal ini dapat berlaku apabila terdapat hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan melawan hukum.²⁵ Keuntungan investasi dari trading forex ini adalah adanya selisih saat membeli dan menjual kembali mata uang negara yang telah diperdagangkan sebelumnya. Selisih ini timbul dari adanya fluktuasi harga. Dalam forex, terdapat unsur spekulasi dan kepastian prediksi yang membentuk adanya stigma bahwa forex merupakan judi. Akan tetapi lain halnya dengan binary option. Binary option hanya menebak pergerakan harga pasar dengan mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan ditambah dengan trader yang harus memilih opsi naik atau turun untuk kemudian menentukan expiry time yang dapat disesuaikan sehingga dalam trading tersebut terdapat pihak yang menang dan kalah.²⁶ Penjaminan hukum secara preventif yang sah melalui peraturan perundang-undangan diberikan untuk mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi. Secara preventif dilakukan sebagai upaya untuk memperkecil kemungkinan tindak pidana atas investasi atau trading illegal. Sementara itu, penjaminan perlindungan hukum secara represif dilakukan ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan keuangan oleh OJK sebagai lembaga yang menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen atau trader ataupun investor. Perlindungan Hukum Diatur dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia “Setiap Orang Berhak atas Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Jadi Yang Dapat diberikan untuk korban Binomo Yaitu Perlindungan hukum preventif dan represif, Dimana Perlindungan Hukum Preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Sanksi bagi pihak pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni salah satunya adalah menawarkan atau mempromosikan suatu barang dan/atau jasa seolah-olah mengandung janji yang pasti memperoleh keuntungan dalam binary option tersebut, diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”. Pelaku Binary Option yang menimbulkan korban terkait dengan penawaran binary option yang berkedok “trading” maka dapat dikategorikan Penipuan yang mengacu pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” Sehingga, dalam hal pemberian perlindungan hukum preventif sudah tidak dapat relevan karena telah menimbulkan korban, maka perlindungan hukum represif yakni dalam hal ini penyelesaian sengketa antara korban dengan penyedia jasa binary option harus dilakukan dengan maksimal, hal tersebut dilakukan dengan 2 cara, yakni pelaporan kepada pihak kepolisian bahwa telah dilakukannya tindak pidana penipuan, dimana pihak binary option melakukan penawaran binary option yang

²⁵ Sri Redjeki Slamet, 2013, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Lex Jurnalica*, Vol 10 No 2, Hlm. 117.

²⁶ Frento T Suharto, 2013, *Mengungkap Rahasia Forex: Pahami Scalping Trading Strategy agar Cepat Menghasilkan Uang*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Hlm. 15-16

berkedok “trading”, serta pelanggaran Perlindungan Konsumen pada pihak binary option dengan cara menjaminkan keuntungan yang akan didapatkan bila korban menggunakan produk jasa dari binary option itu sendiri dan selanjutnya cara yang kedua adalah melalui gugatan perdata, dalam bentuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak binary option, dengan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap kerugian yang telah dialami oleh korban binary option.²⁷

Pelaksanaan hukum pidana di Indonesia dianggap kurang efektif dalam menangani berbagai kasus kejahatan yang bermunculan. Hal ini disebabkan oleh sanksi yang diberikan kepada pelaku dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera yang menyebabkan pelaku tersebut mengulangi perbuatannya setelah bebas dari penjara atau jerat pidananya. Sebagai warga yang berkedudukan di negara hukum, diharuskannya suatu kesadaran untuk taat pada konstitusi. Tetapi hal ini sulit diwujudkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum negara kita sendiri. Oleh karena itu perlu diteliti dan pahami lagi apakah fungsi hukum diterapkan dengan baik kepada masyarakat dan bagaimana implementasinya terhadap kasus-kasus di Indonesia. Berkembangnya kemajuan teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer dengan sangat cepat dapat menghasilkan internet yang multifungsi, kemajuan ini juga telah menghasilkan keresahan - keresahan yang baru dengan munculnya kejahatan dalam bentuk cybercrime. Dalam kasus kejahatan dunia maya, Indonesia telah memiliki cyber law untuk mengatur hukum didalam dunia maya baik di wilayah Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia yang akibatnya dirasakan di Indonesia. Faktor penyebab seorang affiliator melakukan tindak pidana penipuan dalam trading binary option itu karena bisa mendapatkan uang sangat banyak dengan hanya merekrut orang - orang agar memakai link afiliasi dari si affiliator tersebut. Afiliator mendapat keuntungan 70 persen dari kerugian trader, sedangkan penyedia layanan trading binary option mendapat 30 persen. Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin (14/11), Majelis hakim menilai, aset sitaan dari Indra Kenz tidak berhak dikembalikan kepada para korban dalam perkara ini. Majelis hakim menilai para korban bersalah karena bermain judi.²⁸

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang hanya untuk memidana pelaku tanpa memulihkan aset korban yang mengalami kerugian, maka untuk penegakan hukum hanya semakin jauh dari keadilan terlebih untuk para korban tindak pidana sehingga menelusuri kemana aliran uang Padahal apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan secara komprehensif, kita tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Bahkan, apabila memperhatikan pada aspek pencarian kebenaran materiil sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan suatu kejahatan, peranan korban pun sangat strategis, dengan demikian sedikit banyak menentukan dapat tidaknya pelaku kejahatan memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam hubungannya antara pelaku kejahatan dengan korbannya, sistem hukum yang berlaku (KUHAP) sekarang kurang peduli terhadap kepentingan korban. Kehadiran korban dan saksi dalam proses peradilan selain tidak diberi kompensasi karena mereka meninggalkan pekerjaan dan membutuhkan biaya menuju ke tempat sidang, perlindungan keselamatan dari gangguan pelaku dan kelompoknya juga tidak dijamin.²⁹

²⁷ Rina Ramadhani, 2022, Perlindungan Trader Dalam Platform Investasi Online Di Indonesia : Studi Kasus Platform Binomo, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.21, No.3, Hlm. 89

²⁸ Adalia Safira Rahma, 2022, Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5 No. 1, Hlm. 56-65

²⁹ Satriawan Sulaksono, 2019, Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol VII No 1 Hlm.* 109.

Meskipun Binomo termasuk ke dalam pialang berjangka yang ilegal dan memiliki ciri-ciri terhadap tindak pidana judi online, pada kenyataannya Binomo dapat bergerak bebas dan dapat dioperasikan di Indonesia. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah harus memblokir pialang berjangka tersebut agar tidak dapat beroperasi bebas di Indonesia. Maka dari itu, untuk kasus ini termasuk ke dalam kasus penipuan, yang meskipun badan yang menjalankan pialang berjangka tersebut tidak memiliki izin, namun untuk para traider berhak untuk meuntuk kerugian yang ditimbulkan oleh pialang ini. Dari sini kita bisa melihat unsur-unsur yang termasuk kedalam tindak penipuan yaitu :

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu
- c. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho setuju jika jaksa kasus Indra Kenz mengajukan banding. "Betul jaksa mengajukan banding, karena itu barang milik korban dan harus dikembalikan kepada korban," ujar dia kepada reporter Tirto, Kamis (17/11/2022). "Kalau uang itu dirampas untuk negara, masa negara menggunakan uang masyarakat? Itu tidak adil," lanjut Hibnu. Hibnu setuju jika Indra mendekam di penjara atas perbuatannya, namun hakim juga harus cermat menganalisis soal penyitaan hasil kejahatan.

Perampasan tercantum pada Pasal 39 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Hakim juga kudu jeli bahwa uang Indra Kenz berasal dari masyarakat yang ia tipu. Memang betul Indra menggunakan uang hasil kejahatannya. Lalu, uang panas itu negara rampas, kemudian negara mau gunakan untuk apa uang rampasan tersebut? Hibnu menegaskan tak elok jika hak korban dijadikan hak negara.³⁰

V. Kesimpulan

Permasalahan pertama seorang affiliator juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi orang lain agar menggunakan produk yang dipromosikannya. Dalam hal ini affiliator binary option dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi marketing karena mempromosikan pada masyarakat luas. Umumnya seorang affiliator melakukan promosi dengan cara mempertontonkan keuntungan dari hasil trading untuk menarik target konsumennya. Hingga saat ini, tidak terdapat payung hukum yang mengatur binary option. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai pengawas industri jasa keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) sebagai pengawas perdagangan komoditas tidak mengakui binary option. Karena pemberantasan tindak pidana pencucian uang hanya mengedepankan untuk memidana

³⁰ Adi Briantika, Kasus Indra Kenz : Tepatkah Harta Korban Binomo Di rampas Negara, <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/kasus-indra-kenz-tepatkah-harta-korban-binomo-dirampas-negara-gyK3>, Diakses Pada 3 Januari 2023, Pukul 22.00 Wib

pelaku tanpa memulihkan aset korban yang mengalami kerugian, maka penegakan hukum akan semakin jauh dari hakekat tujuan keadilan terlebih bagi korban tindak pidana sehingga menelusuri kemana aliran uang (*asset tracing*) dengan tujuan untuk memulihkannya kepada korban yang telah dirugikan secara ekonomi tersebut. Hukum pidana memperlakukan korban seperti hendak mengatakan bahwa satu satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Padahal apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan secara komprehensif, kita tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Sehingga dari segi keperdataan, dapat dilakukan proses ganti rugi terhadap korban dari trading Binomo dengan melakukan gugatan restitusi atau menggunakan alur sesuai dengan Pasal 1365 KUHAP, Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP dan Pasal serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.
- Acep Rohendi, 2015, *Consumer Protection in the E-Commerce: Indonesian Law and International Law Perspective*, *Ecodemia*, 3 (2), hlm. 3.
- Atin Carolina Parei dan Fitika Andraini, 2018, Fungsi dan Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Semarang, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21 (2), hlm. 6-7.
- Badan POM, 2016, Bahan Tambahan Pangan yang Dilarang Digunakan dalam Produk Pangan, diunduh dari <https://standarpangan.pom.go.id/berita/bahan-tambahan-yang-dilarang-digunakan-dalam-produk-pangan> tanggal 30 September 2022.
- Bernd Van Der Meulen, 2011, *Private Food Law Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers.
- Cristina Eghenter, et al., 2018, *Perempuan, Pangan dan Keanekaragaman Hayati*, Jakarta: World Wide Fund for Nature - Indonesia.
- Debora Pasaribu, et al., 2021, Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyarakat untuk Menjaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9 (3), hlm. 51.
- Dewa Ayu Sekar Vikanaswari dan I Ketut Sudjana, 2016, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Keracunan Makanan, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5 (1), hlm. 2.
- Didi Sukardi, 2015, Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam, *Al- Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (1), hlm. 105.
- Direktorat Standanisasi Produk Pangan, 2012, *Petunjuk Meminimalkan Terbentuknya Cemaran Kimia pada Pangan Siap Saji dan Pangan Industri Rumah Tangga sebagai Pangan Jajanan Anak Sekolah*, Jakarta: Badan POM RI.
- Direktorat Standanisasi Produk Pangan, 2013, *Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk Pencapaian Gizi Seimbang*, Jakarta: Badan POM RI.
- Eni Nurkhayani, Ely Setyowati, dan Yudhi Harsatriadi Sandyatma, 2015, *Ketahanan Pangan di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Hisma Kahman, 2020, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Palopo, *Iqtishaduna*, 1 (4), hlm. 220.

- Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*, Bekasi: Jala Permata Aksara.
- I Gede Tirtayasa, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2022, Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3 (1), hlm. 3.
- Idtesis, Desember 2011, Metodologi Penelitian Hukum Berdasarkan Sifatnya, diunduh dari <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/> tanggal 27 September 2022.
- M. Durovic, 2020, International Consumer Law: What Is It All About?, *Journal of Consumer Policy*, 4 (3), hlm. 126.
- Maureen K Ohlhausen, 2015, Competition, Consumer Protection, and The Right (Approach) to Privacy, *Antitrust Law Journal*, 80 (1), hlm. 134.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhamad Qustulani, 2018, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suryadharma Ali, 2013, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an.
- Tri Rini Puji Lestari, 2020, Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen, *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11 (1), hlm. 62-63.
- Tri Sulismuji Wiyono, 2020, Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4 (1), hlm. 22.
- Vermonita Dwi Caturjayanti, Afifah Kusumadara, dan Yuliati, 2022, Protection of Consumer Position in Relation with Business Actors from an Absolute Responsibility Perspective, *International Journal of Social Science Research and Review*, 5 (6), hlm. 65.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.